

LPDP Plus

**“Usulan Kebijakan Penurunan Ketimpangan Pasar Kerja:
Perluas Kesempatan Kerja untuk Semua”
Memo Kebijakan Kepada Menteri Keuangan;
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah;
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
Kementerian Ketenagakerjaan**

LATAR BELAKANG

- Pemerintah saat ini hingga Juni 2016 sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2017. Pemerintah menyusun perubahan strategi anggaran dari sebelumnya berdasarkan program di masing-masing kementerian, sekarang berorientasi pada prioritas pembangunan nasional (*money follow program* prioritas dan bukan *money follow function*)
- Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah menurunkan kesenjangan pendapatan. Bahkan di dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan ketimpangan dari 0,41 menjadi 0,36.
- Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan kerja akan makin ketat. Prospek kehilangan lapangan kerja akan menjadi nyata jika tidak dapat menangkap peluang dengan terbukanya sector jasa di ASEAN
- Bank Dunia telah menyatakan salah satu sumber ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah ketimpangan pasar kerja. Terlalu banyak angkatan kerja kita *low skill* dan *low education*
- Indeks Barometer Sosial yang disusun INFID ditahun 2015 menunjukkan terbatasnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan salah satu penyebab ketimpangan

REKOMENDASI INFID disusun sebagai bahan masukan kepada para Menteri terkait dan pengambil kebijakan.

Bahan-bahan penulisan berdasarkan sumber-sumber media dan yang dapat dipercaya. Kesimpulan dan rekomendasinya diupayakan dapat diuji dan diperdebatkan.

Tujuannya untuk menyuarakan suara dan usulan-usulan kelompok masyarakat sipil Indonesia dan warga negara yang memimpikan politik yang cerdas dan berbasis program dan menginginkan pembangunan yang lebih Inklusif, untuk semua dan melindungi hak asasi manusia.

Tim penyusun:

Sugeng Bahagijo, Wahyu Susilo, Paksi Walandouw, Nikmah

**** Diperkenankan untuk mengutip dengan menyebut judul dokumen dan nama penyusun.**

MASALAH

1. **Setiap tahun ada tujuh juta warga** Indonesia mencari kerja. Setiap tahun ada 1-2 juta pencari lapangan kerja. Profil angkatan kerja Indonesia, sebagian besar atau 62% lulusan SMA ke bawah
2. Namun banyak industri yang **kesulitan mendapatkan angkatan kerja baru**. Contohnya industri perawatan angkutan udara hanya mampu menyerap 30% tenaga kerja dari hampir 70 perusahaan di dalam negeri akibat kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Padahal dibutuhkan 1.000 tenaga kerja dalam setahun (Bisnis Indonesia, 2 April 2016)
3. **Human Development Indeks (HDI) Indonesia 2014** berada di kelompok *Medium Human Development* atau berada di ranking 10. Indonesia di bawah Singapore dan Brunei Darussalam yang kelompok *Very High Human Development*, dan di bawah Malaysia dan Thailand yang berada di kelompok *High Human Development*.
4. Pelatihan kerja oleh Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta maksimum melatih kerja kepada **satu juta lebih pencari kerja**. Pemerintah telah menyediakan 20% anggaran untuk pendidikan, dan terbear dikelola dan dikerjakan melalui pendidikan formal SD, SMP, SMK dan PT. Akses dan Mutu untuk SMK (formal) masih sangat terbatas dibanding jumlah angkatan kerja dan pencari kerja.
5. Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), merupakan langkah yang bagus tetapi tidak terbuka kepada mereka yang lulusan SMA ke bawah yang hendak melakukan Pelatihan Kerja dan Pemagangan kerja di dalam negeri dan luar negeri.
6. Profil pengangguran tertinggi (45%) lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Sementara lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak yang menganggur dibanding lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)

REKOMENDASI

1. Pemerintah perlu **bertindak aktif dan mengerahkan seluruh daya dan dana** untuk memfasilitasi, mendukung dan menjadi *“a helping hand”* bagi angkatan kerja dan pencari kerja
2. Pemerintah perlu membuat aturan nasional **“wajib menyelenggaraan pemagangan kerja”** bagi perusahaan swasta, perusahaan BUMN dan Kementerian dan Lembaga
3. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan Tinggi **“wajib” memperkuat aturan pemagangan** untuk memperkuat kualitas dan relevansi serta kesiapan kerja lulusan S1 dan S2 di swasta dan negeri sesuai bidang keahlian
4. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan perlu menyisihkan **Rp 20 hingga Rp 30 triliun** untuk pelatihan kerja dan pemagangan kerja khusus untuk mereka yang lulusan SD-SMA, dan mereka yang sudah pengalaman kerja tetapi tidak memiliki ijazah SMP dan SMA
5. Kementerian Keuangan membuka **satu window di LPDP** untuk “Pelatihan Kerja dan Pemagangan Kerja di dalam dan luar negeri” untuk membuka akses beasiswa dan pendanaan bagi mereka yang lulusan SMA ke bawah
6. Kementerian Pendidikan perlu **membangun link and match dengan dunia industri** terutama melakukan identifikasi industri-industri utama di nasional dan daerah yang memiliki *gap* tenaga kerja (jumlah angkatan kerja, kualifikasi dan keahlian kerja). Identifikasi ini dilakukan tidak hanya di nasional namun juga di daerah sehingga ada kepastian kerja bagi lulusan BLK yang ada di daerah-daerah
7. Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan **revitalisasi BLK dengan memanfaatkan potensi swasta dan serikat pekerja untuk memastikan akses dan mutu pelatihan kerja**. Revitalisasi tersebut disertai dengan evaluasi berkala untuk melihat efektivitas BLK yang ada dan menyesuaikan program BLK dengan profil angkatan kerja yang berpendidikan rendah
8. Dalam konteks perlindungan buruh migran Indonesia, komponen pelatihan tenaga kerja malah menjadi salah satu komponen eksploitasi dengan mewajibkan calon buruh migran Indonesia membayar uang hingga Rp. 16 juta untuk pembiayaan pelatihan, padahal kualitas pelatihan yang diberikan sangat tidak memadai. **Saatnya negara memberikan layanan terbaik pelatihan buruh migran dari sumber-sumber APBN dan sumberdaya lain yang dimiliki negara untuk mengakhiri pembebanan utang bagi calon buruh migran.**

INFID adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1985 beranggotakan organisasi masyarakat sipil yang tersebar di seluruh Indonesia. INFID kini memiliki status sebagai lembaga yang diakui dan diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan UN Special Consultation Status with the Economic and Social Council sejak 2004. INFID juga merupakan anggota IFP (International Forum for national NGO Platform) berbasis di Paris, Prancis . IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia (<http://www.ong-ngo.org/en>) sejak 2009. INFID juga merupakan bagian dari Beyond 2015 (www.beyond2015.org). Beyond2015 merupakan jaringan CSO mutinasional yang melakukan kampanye untuk agenda pembangunan Paska 2015.



Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540
Phone : 021 7819734, 7819735
Fax : 021 78844703
e-mail : infid@infid.org, Facebook : infidjakarta, Twitter: @_infid_
website : www.infid.org